



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI WIBAWA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 99342

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.880.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 2252 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 1.600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 402 m2/685 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/400 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 730.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 480.000.000**

1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, HONDA CMX500AK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOTOR, VESPA SPRINT SCOOTER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
6. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 29.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	468.759.690
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.857.759.690
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.857.759.690

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.